

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

CS.T.Kansil, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2003).

Hakim, Lukman, *Filosofi Kewenangan Organ dan Lembaga Daerah Perspektif Teori Otonomi dan Desentralisasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Hukum dan Kesatuan*, (Malang : Setara Pers, 2012).

Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta : Gramedia, 1984).

Manan, Bagir, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, (Jogjakarta : PSH Fakultas Hukum UII Jogjakarta, 2001).

Mardalena, dan Sarinah, *Pengantar Manajemen* (Yogyakarta : Deepublish, 2017).

Mardiasmo, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, (Jakarta : ANDI, 2003).

Moh, Mahfud MD, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, (Jakarta : PT Rineka Cipta, 2001).

Nawawi, Zaidan, *Manajemen Pemerintahan*, (Jakarta : PT Rajagrafindo Persada, 2013).

Nurcholis, Hanif, *Teori dan Praktik Pemerintahan*, (Jakarta : Grasindo, 2007).

- Sedarmayanti, *Good Governance (kepemerintahan yang baik) dalam rangka Otonomi Daerah Upaya Membangun Organisasi Efektif dan Efisien melalui Restrukturisasi dan Pemberdayaan*, (Jakarta : Mandar Maju, 2003)
- Siti Mamudji, dan Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta : Rajawali Press, 1985).
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Press, 2003).
- Soemitro, Ronny Hanitjo, *Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1998).
- Sunarno, Siswanto, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, (Jakarta : Grafika, 2006)
- Suradinata, Ermaya, *Konsep Manajemen Publik Aplikasi dan Implementasinya dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1997).
- Syafiie, Inu Kencana, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, (Jakarta : PT Rineka Cipta, 2002).
- Y.W, Sunindhiya, *Praktek Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1996).
- Zaidan, Nawawi, *Manajemen Pemerintahan*, (Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2013).

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 44 Tahun 2016
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2017
tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi dan
Kabupaten/Kota.

Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Peraturan Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 44 Tahun 2016
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat.

C. Internet

Laely Widjayanti, *Peran Inspektorat Daerah sebagai Aparat Pengawas
Internal Pemerintah*, [http://laely-
widjayanti.blogspot.co.id/2013/10/peran-inspektoray-daerah-
sebagai.html](http://laely-widjayanti.blogspot.co.id/2013/10/peran-inspektoray-daerah-sebagai.html), diakses pada 14 Januari 2018.

Vinod Mehra, *Peran Inspektorat dalam penyelenggaraan fungsi pengawasan di Pemerintahan Daerah*,
<http://www.academia.edu/31744290/sistem-pemerintahan-daerah-di-indonesia>, diakses pada 14 Januari 2018.

